

## TERAS METRO

### Tata 101 Rumdin

**FRAKSI** Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat mendesak pemerintah provinsi menata aset, khususnya aset berupa 101 unit rumah dinas golongan III. Hingga kini, status rumah-rumah tersebut dinilai masih tidak jelas. "Itu hasil evaluasi tahun 2004, dan sampai sekarang tidak jelas status dari ratusan rumah dinas tersebut," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalbar, Andry Huda, kemarin.

Menurutnya, jika satu unit rumah itu diperhitungkan senilai Rp125 juta (perkiraan harga pada masa itu), berarti secara keseluruhan terdapat Rp12,5 miliar aset Pemprov Kalbar yang ke

• ke halaman 15 kolom 1

### Tata 101 Rumdin

*Sambungan dari halaman 9*

beradaannya patut dipertanyakan. Ia berharap pemprov serius menangani masalah ini. "Sampai sekarang aset-aset tersebut tidak tertata dengan baik. Pemprov harus menindaklanjutinya kalau memang aset-aset itu akan di-dum," katanya.

Inventarisasi dan penataan serta pendayagunaan aset milik Pemprov Kalbar dinilai masih sangat lemah. Kondisi ini sangat disesalkan. Sebab, di sisi lain ada instansi tertentu yang memerlukan lahan untuk menunjang program, justru kesulitan karena ketiadaan aset.

Sebagai contoh adalah Dinas Sosial Kalbar. Instansi itu kesulitan membangun tempat penampungan bagi TKI bermasalah. "Padahal dana dari pusat ada, tetapi karena disebutkan bahwa tidak ada aset yang kosong lagi, Dinas Sosial memanfaatkan lahan di belakang kantor tersebut yang sebetulnya tidak layak," ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil audit khusus tentang pengelolaan aset di pemprov, BPK menemukan adanya barang milik daerah senilai Rp1,952 miliar yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, terdapat aset hibah pemerintah pusat senilai Rp3,8 miliar

juga tidak jelas statusnya. BPK pun mendapat temuan adanya penggunaan dan pemanfaatan aset peralatan dan mesin yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp2,9 miliar.

BPK juga mencatat masih adanya tanah pemprov yang dikuasai pihak ketiga senilai Rp917 juta dan tanah pemprov yang belum bersertifikat senilai Rp79,9 miliar. BPK meminta agar masalah-masalah ini segera ditindaklanjuti oleh pemprov.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalbar, TTA Nyarong sebelumnya telah menegaskan, upaya penertiban aset terus dilakukan oleh pemerintah provinsi, baik

aset bergerak maupun tidak bergerak. Dalam waktu dekat, pol pp akan mengeksekusi dua mobil dinas yang masih dikuasai oleh orang yang tidak berhak.

Usai penertiban aset bergerak (mobil dinas) ini, pol pp juga akan menertibkan rumah jabatan DPRD di Jalan Karvin. Sekadar catatan, hingga September 2011, pol pp telah melakukan eksekusi terhadap enam rumah dinas. Rumah itu yakni rumah dinas milik Dinas Kehutanan 1 unit, Dinas Kesehatan 2 unit, Dinas Pertambangan dan Energi 1 unit, Dinas Perhubungan 1 unit dan Dinas Pekerjaan Umum 1 unit. (ron)